

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Dalam lingkup globalisasi, proses internasional memiliki implikasi yang signifikan bagi negara-negara yang telah menerapkan globalisasi meliputi negara maju di dunia maupun negara yang sedang berkembang, dalam konteks hubungan internasional. Globalisasi telah secara signifikan mengubah pandangan negara tentang bagaimana mengelola hubungan diplomatik antar negara. Interaksi yang lebih mudah diakses dan pergeseran fokus dari energi lama ke energi baru dengan pertumbuhan ekonomi sebagai poros utama. <sup>1</sup>Implikasi yang semakin nyata dari kehadiran aktor-aktor transnasional di seluruh dunia adalah kompleksitas aliran mata uang dan pertumbuhan ekonomi yang semakin terbuka, yang menimbulkan tantangan baru bagi negara-negara untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang diperbarui.<sup>2</sup>

Dalam prana luas, kebijakan luar negeri atau politik luar negeri merupakan kelanjutan dari politik dalam negeri, yang berarti kebijakan luar negeri adalah alat atau instrument yang digunakan oleh suatu pemerintah suatu negara untuk mencapai kepentingannya..<sup>3</sup> Indonesia, sebagai suatu negara yang mengalami pengaruh dari dinamika global, dengan kesadaran akan pentingnya peran kebijakan luar negeri dalam mencapai kepentingan nasional. Pada tahun 2016, dimulailah

---

<sup>1</sup> Ikhsan, H.,(2016). *Hubungan Kerjasama Pariwisata Indonesia-Korea Selatan Tahun 2015-2016*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, vol. 4, no. 2, pp. 1-15

<sup>2</sup> Giddens, A.(1990). Dalam Zoran Stevanovic, *Globalization: theoretical perspectives impact and institutional response of the economy*.2008,series: Economic and Organization vol:5. Hal.264.

<sup>3</sup> Ibid

upaya peremajaan melalui proses pembaharuan. Melalui perpres no.21 tahun 2016 Indonesia merespon perubahan dinamika global dengan memberikan kemudahan lalu lintas antar negara berupa pembebasan visa kunjungan terhadap 169 negara.<sup>4</sup>

Keputusan ini ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kunjungan luar negeri yang berdampak terhadap pendapatan devisa negara dan pengembangan industri lainnya. Seperti pariwisata sekaligus bertujuan untuk mengeratkan hubungan diplomatik dengan harapan mendapat hubungan timbal balik terhadap negara-negara yang dianggap berpotensi dalam pencapaian kepentingan Indonesia.<sup>5</sup> Korea Selatan merupakan negara yang dituju dari kepentingan nasional dan dianggap sebagai mitra potensial bagi Indonesia. Hal ini didasari oleh hubungan diplomatik antara kedua negara telah berlangsung lama dengan kecenderungan saling menguntungkan.

Hubungan diplomatik kedua negara saat ini menginjak usia ke 43 tahun dimulai pada September 1973.<sup>6</sup> Namun, kerjasama bilateral antara kedua negara telah dimulai sejak Agustus 1966, menunjukkan tingkat konsultasi yang tinggi. Baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, kedua negara terus berkomitmen untuk memperkuat hubungan dan kerja sama mereka. Hubungan bilateral antara kedua negara dalam bidang kerjasama memiliki kecenderungan untuk saling mendukung karena adanya ketergantungan dan kebutuhan antara kedua negara dalam *National Power* yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selain itu,

---

<sup>4</sup> Kemlu.(2016) Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.Kementerian luar negeri Indonesia

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Kemlu. (2023). *Profil Negara dan Hubungan Bilateral*. Retrieved from Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Seoul, Korea Selatan.

perkembangan ekonomi dan politik yang positif di kedua negara tersebut telah membuka peluang kerja sama yang luas di berbagai sektor.<sup>7</sup> Korea Selatan merupakan negara yang memiliki peran strategis dalam berinvestasi di Indonesia dan statistik membuktikannya. Dengan nilai investasi \$8,5 miliar, Indonesia adalah salah satu tujuan investasi asing teratas untuk Korea Selatan.<sup>8</sup>

Dengan memperhatikan hubungan strategis antar negara yang sudah terjalin lama. Korea Selatan telah muncul sebagai salah satu negara terpenting dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan memiliki pengaruh positif di antara kedua negara yang menjanjikan tersebut. Terdapat literatur yang penulis gunakan sebagai pedoman, pedoman dan referensi dalam penulisan penelitian ini. Sebagian besar studi sebelumnya tentang Kebijakan Bebas Visa telah membahas perubahan yang dihasilkan dari kebijakan ini. Yakni, memperkuat hubungan diplomatik antara negara dan mitra potensialnya.

Pujiharini & Ichihasi 2016. Dalam artikelnya *The Impact of Visa Entry on Determinants of Inbound Tourism Demand in Indonesia*. Jelaskan bagaimana penerapan kebijakan bebas visa mempengaruhi pertumbuhan wisatawan asing. Singkat kata, kebijakan bebas visa Indonesia berdampak signifikan dalam menyambut wisatawan mancanegara.<sup>9</sup> Selain itu, pada tahun 2013, Balli Faruk dalam publikasi "Pengaruh serial drama Turki yang diekspor dan bebas visa masuk

---

<sup>7</sup> Yuwanto, J. s. (2014). *Era Emas Hubungan Indonesia-Korea Selatan*. Jakarta: Kompas. hlm 19.

<sup>8</sup> KEMLU. *Profil Negara dan Hubungan Bilateral*. Retrieved from Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Seoul, Korea Selatan

<sup>9</sup> Pujiharini, F.(2016).*The Impact of Visa-Free Entry on the Determinants of Inbound Tourism Demand in Indonesia*. core.ac.uk

pada pariwisata Turki", menyatakan bahwa kebijakan bebas visa dapat berdampak besar dalam meningkatkan jumlah orang asing. Selain itu, kebijakan mendukung sektor pariwisata melalui investasi pemerintah, menjadikan perjalanan bebas visa sebagai opsi yang menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>10</sup>

Gabriella Betty.A, dalam artikel "Rasionalitas Indonesia dalam Menetapkan Kebijakan Bebas Visa Tahun 2016", menjelaskan alasan Indonesia menggejut industri pariwisata dengan cara meningkatkan jumlah penerima akses bebas visa dengan menggunakan level analisis kebijakan luar negeri dan model kebijakan luar negeri yang adaptif. pada metode politik dan menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi negara mengeluarkan pedoman. Persyaratan tersebut merupakan faktor internal dan eksternal yang kemudian menjadi penentu kebijakan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian saat ini, belum ada pembahasan mengenai alasan yang menyebabkan pemilihan negara sebagai mitra potensial dalam kebijakan bebas visa Indonesia. Oleh karena itu, penulis memandang adanya urgensi untuk membahas fenomena atau peristiwa yang melatarbelakangi terpilihnya Korea Selatan sebagai mitra dalam kebijakan *Free Visa Policy* Indonesia.

---

<sup>10</sup>Balli,F,(2013).*Impacts of Exported Turkish Soap Operas and Visa-Free Entry on Inbound Tourism to Turkey*. Tourism Management

<sup>11</sup>Gabriella, A.(2019). *Rasionalitas Indonesia Menetapkan Kebijakan Bebas Visa Pada Tahun 2016*.University of Muhammadiyah Malang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari gambaran umum yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat ditelaah betapa besar potensi pariwisata internasional dan upaya yang dilakukan oleh negara untuk memanfaatkannya melalui kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang akan penulis analisis adalah Apa alasan Indonesia mengeluarkan kebijakan *Free Visa Policy* terhadap Korea Selatan pada tahun 2006-2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan peneliti melalui penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Pembangunan Nasional Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Berdasarkan konteks awal, hal yang ingin didapat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam memilih Korea Selatan dalam kebijakan bebas visa. Selain itu, melihat perkembangan dinamika hubungan politik internasional antara Indonesia dan Korea Selatan pada masa yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan untuk menganalisis studi kasus lainnya yang berkaitan dengan hubungan Indonesia dan Korea Selatan.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Perspektif Globalis

Perspektif globalis adalah fenomena di mana aktor-aktor baik dari negara maupun non-negara saling terhubung secara lebih intensif, sehingga peristiwa yang terjadi di satu lokasi dapat mempengaruhi aktor di lokasi lainnya. Globalisasi merupakan proses sejarah yang menyampingkan masalah batasan ruang dari organisasi sosial manusia untuk terhubung dan meningkatkan pencapaian hubungan kekuasaan.<sup>12</sup>

Globalisasi adalah sebuah gagasan yang ragam rupa meliputi peningkatan integrasi ekonomi, komunikasi, dan budaya melintasi batas-batas nasional negara. Menurut Hurrel, mengungkapkan pendapat mengenai globalisasi meliputi beberapa hal diantaranya adalah adanya peningkatan dramatis dalam ketergantungan ekonomi. kemudian teknologi informasi terbaru dan berubahnya alur informasi yang cepat dan tepat sedang sehingga menguatkan keterhubungan masyarakat.<sup>13</sup>

Hal ini mempengaruhi perasn pasar global dan fasilitas peningkatan dari arus kekuatan, pengetahuan dan gagasan, serta peningkatan kemampuan beberapa golongan aktor dalam melintasi batasan negara yang ditandai dengan arus mata uang yang semakin canggih dan perekonomian yang semakin terbuka. Hal ini merupakan ambisi yang dapat dimanfaatkan bagi aktor global untuk mempercepat

---

<sup>12</sup>Mingley, J. (2007). *perspective of globalization, sosial, justice and welfare*. Journal of sociology and welfare, vol. 34, issue 3.

<sup>13</sup>Nuraini S, dkk.,2010, *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka pelajar,hlm. 48

pembangunan nasional. Globalisasi membuat dunia sedemikian perubahan sehingga ekonomi dan praktik bisnis tidak lagi menghormati batas negara.<sup>14</sup>

#### **1.4.2 Visa Policy**

Secara umum, visa dipahami sebagai bukti izin tinggal atau pemberian izin kepada penduduk yang memasuki wilayah negara bagian lain yang memerlukan paspor..<sup>15</sup>

Akses arus lalu lintas perpindahan penduduk suatu negara ke negara lain yang memiliki kedaulatan wilayah haruslah memiliki dokumen resmi yang menunjukkan izin perjalanan antar negara.<sup>16</sup> Visa merupakan instrumen yang digunakan negara guna mengontrol kedaulatan wilayah dari arus lalu lintas warga negara asing yang masuk kedalam wilayah negara. Visa dikeluarkan oleh pihak berwenang dari suatu negara dengan dasar peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>17</sup>

Penerapan peraturan visa dapat berbeda dalam implementasinya di tiap-tiap negara. Namun secara umum visa dapat dibagi menjadi beberapa jenis dengan didasari oleh pengelompokan tujuan kunjungan. Adapun kelompok jenis visa akan di jabarkan sebagai berikut ; (1) visa kerja, visa ini diberikan kepada individu yang ingin bekerja di negara tujuan. Visa kerja biasanya memerlukan sponsor dari perusahaan atau institusi yang berlokasi di negara tersebut.<sup>18</sup> Visa kerja dapat memiliki periode tertentu atau bisa diperpanjang sesuai dengan kontrak kerja (2) visa bisnis, visa ini diberikan kepada individu yang ingin melakukan kegiatan bisnis

---

<sup>14</sup> Sidabutar.S.(2011).*Dampak Penyelenggaraan Piala Dunia 2010 Terhadap Perekonomian Afrika Selatan.Pekanbaru*. Universitas Riau

<sup>15</sup> Sekar, N.(2016). *Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata*, Industri Business Daily Jakarta.

<sup>16</sup> Kemlu.(2011). *VISA Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.kemlu.go.id

<sup>17</sup> OCBC NISP.(2021). *Apa itu Visa: Arti, Fungsi, Jenis dan Bedanya dengan Paspor*. ocbcnisp.com

<sup>18</sup> Trevena, P. (2019). *Post study work visa options: An international comparative review*.

di negara tujuan, seperti pertemuan bisnis, konferensi, atau negosiasi. Visa bisnis umumnya memiliki batas waktu yang ditentukan dan mungkin memiliki persyaratan tambahan seperti surat undangan dari perusahaan yang berlokasi di negara tersebut.<sup>19</sup>

(3) visa diplomatik, Visa diplomatik adalah jenis visa yang diberikan kepada diplomat, pejabat pemerintah, atau perwakilan negara asing yang ditugaskan untuk mewakili negara mereka di negara tujuan. Visa ini memberikan keistimewaan dan perlakuan khusus kepada pemegangnya dalam hal kebebasan bergerak dan kekebalan hukum.<sup>20</sup> (4) visa turis, Visa turis adalah jenis visa yang diberikan kepada individu yang ingin mengunjungi negara tertentu untuk tujuan pariwisata, liburan, atau kunjungan singkat non-bisnis. Visa ini memungkinkan pemegangnya untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu di negara yang dikunjungi dan menikmati kegiatan pariwisata yang disediakan.<sup>21</sup>

Dengan didasari dengan pengelompokan jenis visa maka akan mempermudah negara dalam mengawasi dan mengontrol tujuan individu yang datang ke negaranya. Selain itu visa juga memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan visa mampu berkontribusi terhadap pajak dan pendapatan devisa negara melalui aktivitas imigrasi. Salah satu bentuk aktivitas tersebut adalah pariwisata dimana pemerintah banyak yang

---

<sup>19</sup> Phillips, J. (2007). *Temporary (long stay) business visas*. subclass 457.

<sup>20</sup> Stringer, K. D. (2004). *The visa dimension of diplomacy*. Netherlands Institute of International Relations' Clingendael'.

<sup>21</sup> Chi, P.(2022). *Causal effect of tourist visa exemption schemes on international tourist arrivals*. *Economic Analysis and Policy*, 75, 427-449.



memanfaatkan pembebasan biaya visa turis dalam menekan pertumbuhan pariwisata.

### **1.4.3 *Partner Selection dalam Strategic Partnership***

Secara konseptual, kemitraan strategis atau *Strategic Partnership* telah dilaksanakan berkali-kali, namun tidak ada definisi universal yang mengarah ke sana. Hal ini karena sifat kemitraan strategis yang sangat dipengaruhi oleh studi-studi yang diamati, belum ada kesepakatan umum tentang kemitraan strategis di kalangan peneliti. Secara garis besar, konseptualisasi kemitraan strategis dapat diartikan sebagai acuan yang menggambarkan kondisi peningkatan hubungan bilateral yang bergerak menuju kerja sama untuk mencapai tujuan strategis bersama yang memerlukan koordinasi dalam kemitraan strategis..<sup>22</sup>

Kemitraan strategis dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama berdasarkan kepentingan strategis antar aktor yang bekerja sama untuk memajukan kepentingan yang disepakati. Para aktor berkolaborasi untuk mengatasi tantangan dan meraih peluang bagus di sektor tertentu. Cara bekerja sama sangat fleksibel, sehingga tidak mengikat aktor lain dan memungkinkan negara untuk bekerja sama tanpa mengganggu otonomi masing-masing.<sup>23</sup>

*Strategic Partnership* memiliki beberapa tahapan pengembangan meliputi formasi, implementasi, dan evaluasi<sup>24</sup>. Proses pembentukan atau formasi dimulai dengan memilih mitra atau pihak lain yang sesuai, dengan menentukan mitra yang tepat akan memperjelas upaya mencapai kepentingan bersama dan mengatur kerja

---

<sup>22</sup>Wilkins, T.(2011). *Alignment, not Alliance: The Shifting Paradigm of International Security Cooperation*. Review of International Studies, Vol. 38, No. 1, Hlm 53-57

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Gajauskaite, I.(2013).Op. Cit hal 194

sama secara resmi.<sup>25</sup> Langkah berikutnya adalah fase implementasi yang ditandai dengan pembentukan struktur kerja sama, interaksi yang berkelanjutan, dan pelaksanaan lingkup hubungan menguntungkan antara kedua pihak yang terlibat.<sup>26</sup> Tahap terakhir melibatkan evaluasi pencapaian hasil kerjasama yang telah dilakukan, yang ditandai dengan pembaharuan lingkup hubungan kooperasi, menelaah sektor-sektor yang mencapai hasil kurang memuaskan, dan penilaian keseluruhan dari kerjasama tersebut.<sup>27</sup>

Memilih mitra yang tepat merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan kemitraan strategis. Memilih mitra yang tepat untuk bentuk kerjasama merupakan indikator pemilihan mitra yang dikemukakan oleh Ieva Gajauskaite. Gajauskaite percaya bahwa kepentingan strategis yang tepat adalah faktor terpenting saat memilih pasangan. Namun ada faktor lain yang mempengaruhi kecocokan antara kedua aktor tersebut dalam kemitraan strategis. Faktor-faktor ini meliputi ideologi, potensi keuntungan nyata, kekuatan mitra, dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan itu untuk keuntungan seseorang.<sup>28</sup>

Gajauskaite juga berpendapat bahwa semakin tinggi aspek-aspek yang cocok dari kedua aktor menunjukkan semakin kedua negara memiliki kepentingan dan kemampuan untuk melengkapi satu sama lain<sup>29</sup>. Gajauskaite membagi beberapa indikator yang menjadi acuan dalam pemilihan mitra yang terdiri dari empat indikator yakni : (1) kepentingan strategis yang selaras, (2) evaluasi terhadap

---

<sup>25</sup> Gajauskaite, I.(2013).Op. Cit hal 194

<sup>26</sup> Gajauskaite, I.(2013).Op. Cit hal 197

<sup>27</sup> Gajauskaite, I.(2013).Op. Cit hal 198

<sup>28</sup> Gajauskaite, I.(2013).Op. Cit hal 195

<sup>29</sup> Ibid.

keuntungan dan kerugian yang mungkin didapatkan dari mitra yang berpotensi, (3) evaluasi kekuatan calon mitra dan kegunaannya bagi kepentingan sendiri, (4) kompatibilitas atau visi terhadap sistem internasional, ideologi, nilai-nilai, dan konteks sejarah.

Dari empat acuan yang telah disebutkan di harapkan mampu membuktikan alasan sebuah negara memilih mitra strategis bagi negaranya.<sup>30</sup> Sebagai penjelasan tentang bagaimana acuan penilaian dalam memilih mitra strategis yang dikemukakan oleh Gajaukaite dalam mencari jawaban dari permasalahan maka diperlukan penelaahan dari tiap-tiap indikator. *Strategic Partnership* dalam pemilihan mitra nya tidak hanya terbatas oleh isu-isu pada bidang tertentu, namun memiliki sifat variatif tergantung interest yang mendasari kerjasama. Dalam implementasinya *Strategic Partnership* sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Negara-negara cenderung memilih mitra berdasarkan kecakapan ekonomi dan diplomasi mereka untuk mendapatkan keuntungan di kedua bidang tersebut.<sup>31</sup>

Dengan demikian menunjukkan bahwa perlunya pemaknaan dari setiap indikator berdasarkan kebijakan luar negeri yang mendasari<sup>32</sup>. Indikator pertama yaitu kepentingan strategis yang cocok. Tahapan pertama dalam menetapkan mitra strategis adalah menetapkan mitra dengan kepentingan strategis yang serupa dalam sebuah *Strategic Partnership*. Indikator ini menjelaskan bahwa adanya

---

<sup>30</sup> Strüver, G.(2016).Op. Cit. hal 6

<sup>31</sup> Strüver, G.(2016).Op. Cit. hal 21

<sup>32</sup> Kay, S.(2000). *What is a Strategic Partnership ?*. Problems of Post- Communism, Vol. 47, No. 3, hal 16

kepentingan-kepentingan strategis yang dimiliki oleh masing-masing negara yang kemudian menjadi dasar dari pembentukan kerjasama<sup>33</sup>.

Kepentingan strategis akan menjadi dasar dari kedua negara untuk melengkapi kepentingan satu sama lain dan dapat menjamin pencapaian kepentingan atau tujuan lainnya<sup>34</sup>. Kepentingan lainnya dapat diformulasikan dalam bentuk agenda pembangunan sektor-sektor lainnya seperti politik dan diplomatik, keamanan dan pertahanan, ekonomi dan perdagangan, kebudayaan dan sosial. Negara tidak perlu mencakup semua sektor dalam rangka mencapai kepentingannya, tetapi sektor-sektor yang dipilih akan bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut.<sup>35</sup> Ketika memilih mitra kerja sama, penting untuk menetapkan satu prioritas yang disampaikan dengan keseimbangan atau kesetaraan antara kedua negara. Aktor yang terlibat dalam kerja sama perlu memastikan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan yang bertentangan secara keseluruhan.<sup>36</sup>

Indikator kedua adalah evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan dari mitra kerjasama<sup>37</sup>. Evaluasi terhadap keuntungan dan kerugian sama halnya mencari pro dan kontra yang dimiliki negara terhadap negara calon mitra. Menimbang pro dan kontra merupakan langkah penting sebelum menjalin kemitraan untuk memastikan efektivitas kolaborasi. Terwujudnya kepentingan politik dan diplomasi, keamanan dan pertahanan, ekonomi dan

---

<sup>33</sup> Gajauskaite, I. (2013). Op. Cit hal 192

<sup>34</sup> White, H. (2009). *A Wobbly Bridge: Strategic Interest and Objectives in Force 2030*. Security Challenges Vol. 5, No. 2 Hal. 21-29, Hlm. 22

<sup>35</sup> Strüver, G. (2013). Op. Cit. hal 24

<sup>36</sup> Czechowska, L. (2013). *The Concept of Strategic Partnership as an Input in the Modern Alliance Theory*. The Copernicus Journal of Political Studies, Vol. 4, No. 2 (37-51) Hal. 49

<sup>37</sup> Gajauskaite, I. (2013). Op. Cit hal 193

perdagangan, budaya dan sosial (yang tidak serta merta mencakup seluruh kepentingan negara itu sendiri) menjadi dasar kemitraan.

Jadi, jika dengan melihat pro dan kontra dari pemilihan mitra, maka dapat melihat keuntungan dari mitra membantu suatu negara memajukan kepentingannya sendiri. Sedangkan kerugian adalah hal-hal yang harus ditanggung negara, atau pengorbanan yang dilakukan negara untuk mencapai keuntungan tersebut. Diharapkan keuntungan dan kerugian dari kemitraan strategis akan seimbang untuk menjamin kesinambungan kerjasama itu sendiri. Hal ini juga dapat dijadikan tolok ukur untuk menetapkan ekspektasi terhadap implementasi dan hasil yang dicapai dari kemitraan ini.

Kelebihan dan kekurangannya dapat ditelaah melalui analisis kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Analisis kualitatif menunjukkan dampak bekerja dengan mitra potensial merupakan tahap penting sebelum memasuki sebuah kemitraan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan pencapaian tujuan kerjasama. Perolehan kepentingan politik dan diplomatik, keamanan dan pertahanan, ekonomi dan perdagangan, kebudayaan, dan sosial (tidak harus mencakup semuanya tergantung dengan kepentingan negara sendiri) merupakan dasar sebuah negara melakukan sebuah kemitraan.<sup>38</sup> Pada saat yang sama, negara itu sendiri melihat dalam analisis kuantitatif angka-angka pengeluaran dan kemungkinan manfaat dari implementasi kerja sama. Dengan menggunakan kedua analisis tersebut, Anda dapat memperoleh gambaran atau mengidentifikasi

---

<sup>38</sup> Mouter, N. (2019). *The Politics of Cost-Benefit Analysis*. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press.

keuntungan yang dapat diperoleh dari kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga menghasilkan hubungan yang seimbang dan saling melengkapi.

Indikator ketiga adalah evaluasi kekuatan calon mitra dan kegunaannya bagi kepentingan sendiri. Dari acuan sebelumnya, negara menilai kekuatan negara mitra potensial, maka negara itu sendiri harus menilai kekuatan mitra potensial untuk menegaskan kepentingan negaranya sendiri. Dengan ini diharapkan kekuatan mitra potensial dapat membantu mencapai tujuan negara sendiri di sektor yang ditentukan oleh kepentingan strategis negara.<sup>39</sup>

Menilik wilayah kerja sama, dapat dilihat peran negara mitra dalam kerja sama tersebut. Penting untuk mengidentifikasi kekuatan atau sumber daya yang akan digunakan untuk mempromosikan kepentingan negara sendiri untuk menciptakan hubungan yang sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai.<sup>40</sup> Hal ini tercermin dari kekuatan negara mitra dalam mencapai keuntungan ekonomi, keamanan, dan politik, atau manfaat yang akan dicapai melalui kebijakan yang mendasari jalur kemitraan negara tersebut.<sup>41</sup>

Indikator keempat adalah kompatibilitas atau kesesuaian visi terhadap sistem internasional, ideologi, nilai-nilai, dan konteks sejarah. Dengan menggunakan indikator ini maka akan dapat mengukur kompatibilitas atau kesesuaian negara calon mitra selain menggunakan kecocokan kepentingan yakni dengan mempertimbangkan pandangan terhadap sistem internasional, ideologi, nilai-nilai, dan latar belakang sejarah, negara-negara yang memiliki visi sejalan

---

<sup>39</sup> Wilkins, T. (2011). Op. Cit hal 363

<sup>40</sup> Wilkins, T. (2011). Op. Cit hal 363

<sup>41</sup> Gajauskaite, I. (2013). Op. Cit hal 201

terhadap sistem internasional, ideologi yang serupa, nilai-nilai yang sejalan, dan memiliki sejarah yang saling mendukung memiliki potensi kerja sama yang lebih tinggi.<sup>42</sup>

Dalam penerapannya tidak semua kompatibilitas harus terpenuhi namun dengan semakin tingginya kesesuaian antar negara maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk negara mempertahankan kemitraan jangka Panjang. Atau sebaliknya semakin rendah kesesuaian antar negara maka akan menimbulkan kesulitan dalam memperdalam hubungan kerjasama. Keselarasan dalam pandangan terhadap sistem internasional, nilai-nilai, dan ideologi dapat mengindikasikan adanya kesamaan persepsi dan kecenderungan dalam tindakan, yang pada gilirannya membangun pemahaman terhadap mitra dan memupuk kepercayaan terhadap negara tersebut dengan lebih mudah.<sup>43</sup>

Keharmonisan dan ketiadaan persengketaan dalam konteks sejarah memberikan kepercayaan yang lebih mudah terhadap mitra potensial dan memfasilitasi pelaksanaan kerja sama, terutama dalam bidang yang melibatkan masyarakat. Keharmonisan sejarah juga mencegah masyarakat dari membangun prasangka atau sentimen negatif, sehingga dampak kerja sama dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sipil kedua negara.<sup>44</sup>

---

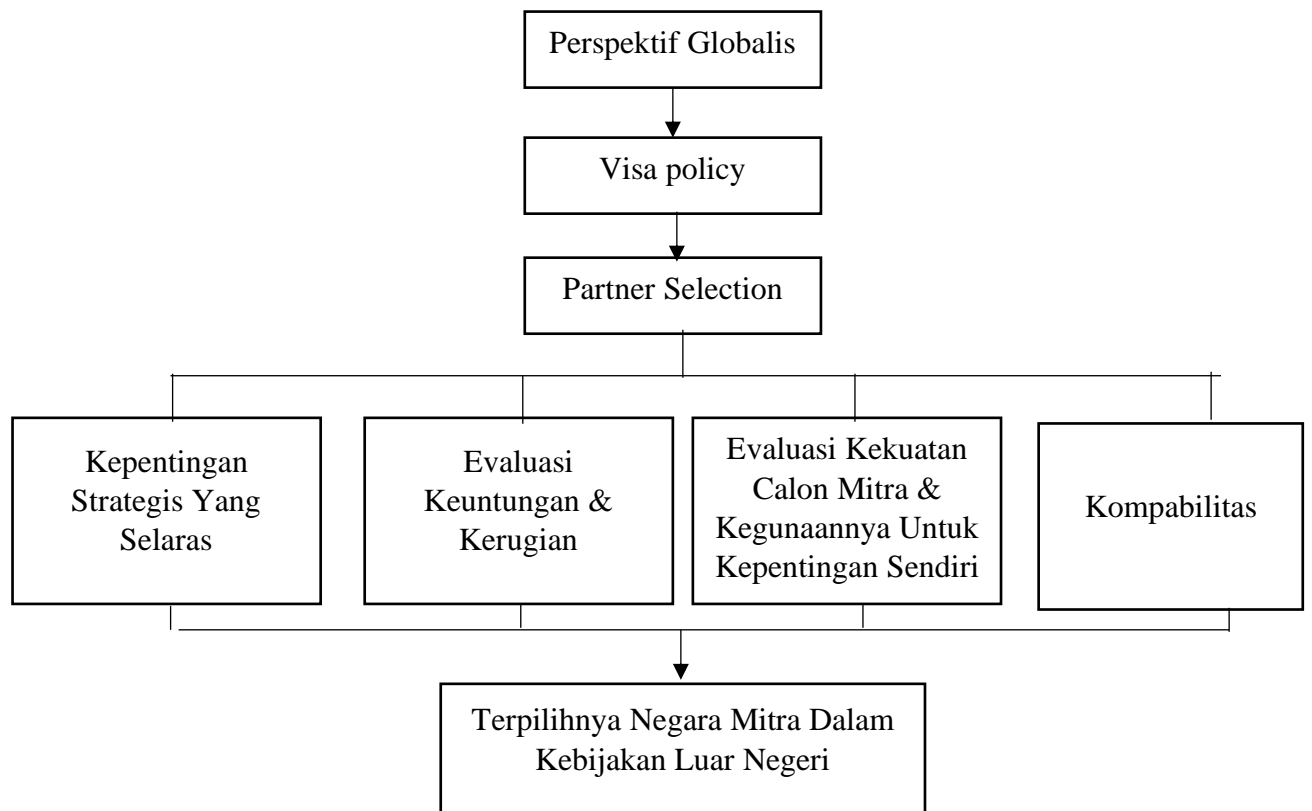
<sup>42</sup> Gajauskaite, I.(2013).Op. Cit hal 194

<sup>43</sup> Wohlstetter, P.(2005).*Strategic Alliances in Action: Toward a Theory of Evolution*. The Policy Studies Journal.Vol. 33 No. 3, hlm 420-442 hal. 430

<sup>44</sup> Gajauskaite,I.(2013).Op. Cit hal 195

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini tentang mencari alasan sebuah negara mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri terhadap negara lainnya adalah sebuah tindakan dalam merespon proses transnasional dari dinamika global. Perspektif globalis menjelaskan terdapat perubahan dalam tatanan global dimana boundaries dari setiap negara ikut berubah dan berpengaruh terhadap negara lain. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sarana kerjasama dalam pencapaian kepentingan. Dengan menggunakan rancangan dari kemitraan strategis penulis menggunakan indikator *Partner Selection* sebagai acuan.



Dengan menggunakan Seleksi Mitra sebagai acuan, dapat diamati alasan di balik pemilihan negara sebagai mitra berdasarkan tingkat kesesuaian yang tinggi berdasarkan kepentingan strategis yang sejalan. Pemilihan negara sebagai mitra diharapkan memberikan keuntungan yang tinggi. Potensi kekuatan yang dimiliki oleh calon mitra dan kompatibilitas yang baik antara negara yang bersangkutan dengan calon mitra juga menjadi faktor pertimbangan.

### **1.6 Argumen Utama**

Melalui konsep memilih mitra atau *Partner Selection* pemilihan Korea Selatan sebagai negara target kebijakan bebas visa Indonesia didasarkan pada tingkat kesesuaian yang tinggi. Tingkat kecocokan yang tinggi tersebut tercermin dari kesesuaian kepentingan kedua negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua negara memiliki prioritas yang sama untuk pengembangan industri, yaitu pariwisata, perdagangan dan investasi.

Kemudian berdasarkan keuntungan dan kerugian yang di dapat dari terjalinnya hubungan kerjasama dengan Korea Selatan. Terdapat sebuah kesempatan bekerjasama dengan negara yang memiliki kemampuan untuk merealisasikan kepentingan Indonesia. Dengan pengorbanan pemberian akses terhadap negara lain untuk masuk kedalam pasar Indonesia.

Berdasarkan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan Korea Selatan untuk mencapai kepentingan nasional, terlihat bahwa Indonesia menyadari jikalau Korea Selatan memiliki potensi untuk mendukung sektor industri pariwisata internasional Indonesia.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode explanatory. Metode eksplanatori adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menerangkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang berhubungan.<sup>45</sup> Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus pada analisis hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel independen.<sup>46</sup> Melalui metode eksplanatif, peneliti berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab dan akibat dalam pemilihan Korea Selatan oleh Indonesia dalam kebijakan Bebas Visa.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian berkaitan dengan periode waktu yang dipilih oleh peneliti untuk menganalisis data dan fenomena yang relevan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membatasi jangkauan waktu antara tahun 2006 hingga 2016. Alasan di balik batasan waktu ini adalah karena pada tahun 2006 menjadi awal kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Korea Selatan yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara kedua negara. Selanjutnya, pada tahun 2016, Indonesia mengeluarkan kebijakan Free Visa Policy melalui Perpres No. 21 Tahun 2016 yang termasuk pemberian akses bebas visa kunjungan ke Korea Selatan.

---

<sup>45</sup> Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Sage Publication. hlm.7- 95

<sup>46</sup> Klotz, A. (2008). *Qualitative Methods in International Relations : A Pluralist Guide*. USA: Palgrave Macmillan.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik yang di gunakan dalam Proses pengumpulan data pada penelitian ini. Dalam studi kepustakaan dikaji berbagai sumber bahan dari perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, laporan dan kepustakaan lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.<sup>47</sup>

Informasi paling penting yakni data priemer digunakan berasal dari sumber langsung, seperti situs web resmi pemerintah dan organisasi internasional. Selain itu, informasi sekunder diperoleh dari referensi di sumber literatur yang ada. Data sekunder atau data pendukung diperoleh melalui artikel akademik, buku, laporan, majalah, terbitan pemerintah dan sumber tertulis lainnya. Peneliti turut menggunakan data dari penelitian sebelumnya yang meliputi publikasi jurnal, berita, laporan resmi pemerintah dan laporan resmi organisasi internasional untuk mendukung penelitian ini.<sup>48</sup>

### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan metode analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada data non-numerik, sehingga tidak melibatkan metode statistik untuk menentukan akurasi.<sup>49</sup> Umumnya, metode analisis data ini sering digunakan untuk mengkaji fenomena, peristiwa, area geografis, negara, organisasi, maupun individu dalam konteks penelitian.<sup>50</sup> Dalam

---

<sup>47</sup> Mirzaqon,T.(2018).*Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK UNESA, Vol. 8, No. 1 hal. 3.

<sup>48</sup> Silalahi, U.(2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> .Lamont,C.(2015).*Research Methods in International Relations*. Sage Publication. hlm.7- 95

penelitian studi hubungan internasional, penggunaan metode analisis data kualitatif biasanya melibatkan studi kasus dan observasi.<sup>51</sup>

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman yang tertata secara berurutan, penelitian ini akan berfokus terhadap masalah yang ingin dijawab kemudian mampu memberikan informatif yang berkaitan dengan komponen-komponen penjelasan substansi yang relevan:

BAB I : Pada bagian ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah yang terkait dengan latar belakang tersebut, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka dan sintesa gagasan, argumen utama dan metodologi penelitian, termasuk jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan struktur penulisan penelitian.

BAB II: Pada bab ini, peneliti akan menguraikan definisi, sejarah, dan perkembangan kebijakan bebas visa Indonesia, serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

BAB III: Pada bab ini peneliti mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan Indonesia terhadap Korea Selatan dalam kebijakan bebas visa dengan menggunakan konsep kemitraan strategis dengan menggunakan indikator pemilihan mitra. Indikator tersebut meliputi kepentingan strategis yang sesuai, evaluasi potensi keuntungan dan kerugian mitra potensial, evaluasi kekuatan dan

---

<sup>51</sup> Neuman W Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon., hal. 477

keuntungan mitra potensial, dan faktor kompatibilitas yang mendorong pembentukan kebijakan bebas visa terhadap Korea Selatan.

BAB IV: Dalam bab ini, penulis akan menganalisis kesimpulan yang dihasilkan serta memberikan kritik dan saran terkait penelitian tersebut.